

RENCANA KERJA

TAHUN 2026



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WAJO

KATA PENGANTAR

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka *good governance* tersebut dan sejalan dengan cita-cita reformasi bangsa, dituntut suatu pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu indikator yang merupakan cerminan suatu pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah bagaimana pemerintahan tersebut melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara bertanggung jawab dan transparan.

Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja - OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo Tahun 2026 ini dimaksudkan selain dari pemenuhan kewajiban sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, juga dimaksudkan menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam rangka penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam penyusunan Renja – OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kami mengucapkan terima kasih. Akhirnya, semoga penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo Tahun 2026 ini dapat bermanfaat.

Sengkang, 2 September 2025



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. WAJO**

ANDI MUSDALIFAH Z, M.Si
NIP. 19690421 199403 2 014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Undang – Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja atau Renja OPD.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja OPD disusun dengan mengacu pada :

- Rencana program prioritas pada Rancangan Awal RKPD untuk perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif,
- Renstra SKPD dalam perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi dan prakiraan maju;
- Dan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan periode sebelumnya.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dan untuk mewadahi hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang disalurkan lewat Forum SKPD serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo Tahun 2026.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kinerja seluruh OPD di daerah yang bersangkutan. Rencana Kinerja (Renja) OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo akan digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menentukan skala prioritas yang selanjutnya akan dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Dengan demikian Penyusunan Rencana Kinerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi sangat penting sebagai pedoman kerja dinas agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat lebih terarah dan terukur.

Lebih Lanjut perumusan Renja OPD merupakan dokumen tahunan sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai selanjutnya dituangkan dalam Dokumen perencanaan yang lebih konkret dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** Kabupaten Wajo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
25. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 33. Peraturann Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 283);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012–2032

- (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 10);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016).
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor)
 43. Peraturan Bupati Wajo Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuannya :

1. Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja bagi Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
2. Memberikan uraian ringkas tentang sasaran penyusunan dokumen Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah menentukan sistematika Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo Tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN memuat Latar Belakang Penyusunan RKPD, Proses Penyusunan RKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program/ kegiatan/ sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan dan rencana strategis, dan kebijakan dan strategi dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Wajo.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH memuat rincian program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo Tahun 2026, yang bertanggungjawab sebagai pelaksana/penanggungjawab, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

BAB V : KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH memuat indikator Kinerja Penyelenggaraan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian Kinerja Tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VI : PENUTUP memuat hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo Tahun 2024 sebagai bagian penegasan pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan Rencana Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Kode	Usuran/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate output)/ sub kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2023			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan (2024)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2025		Catatan
					T	R	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (CAPIL)	100	100	100	95	95	100	100	95	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan tepat waktu	100	100	100	65	65	100	100	65	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3	1	1 lap	1	100	1 lap	1 lap	1	

	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	2	1 dok	0	0	1 dok	1 dok	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0	#DIV/0!			0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASNi	-	24	468 org	464	99,14529915	468 org	464	99,14529915
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	2	1 lap	1	100	1 lap	1	100

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	90	90,00	100	90	90,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	5	1 paket	1	100,00	1 paket	1	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	93	1 paket	1	100,00	1 paket	1	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	2	1 paket	1	100,00	1 paket	1	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11	2	12 Dok	10	83,33	12 Dok	10	83,33
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	1 Lap	1	100,00	1 Lap	1	100,00

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99	100 %	100	100,00	100 %	100	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	5	5 Unit	5	100,00	5 Unit	5	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2800	400	1 Lap	1	100,00	1 Lap	1	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	36	1 Lap	1	100,00	1 Lap	1	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	12	1 Lap	1	100,00	1 Lap	1	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik	100	100	100	100	100	100	100	100

Daerah	daerah perangkat daerah Perangkat Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	8	2 unit	2	100,00	2 unit	2	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48	11	10 Unit	10	100,00	10 Unit	10	100,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase Pencapaian Target Nasional Bidang Kependudukan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	100	100 %	100	100 %	100	100	100
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100	100	1 dok	1	100,00	1 dok	1	100,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase Pencapaian Target Nasional Bidang	100	100	100	100	100	100	100	100

	Pencatatan Sipil								
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100	99	100 %	0	0	100 %	0	0
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting yang terlaksana	100	99	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase bimbingan teknis terkait pencatatan sipil yang terlaksana	100	99	100 %	0	0	100 %	0	0
Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	100	99	1 lap	1	100,00	1 lap	1	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Dukungan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	100	100	100	100	100	100	100

Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	100	100 %	100	100 %	100	100	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	4	1	1 Dok	1	100,00	1 Dok	1	100,00
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100		100 %	100	100 %	100	100	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2	1	1 Dok	1	100,00	1 Dok	1	100,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.1.1. Tugas Fungsi dan Kedudukan Organisasi

2.2.1.1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan urusan Administrasi kependudukan berdasarkan pedoman yang berlaku sehingga tercipta kelancaran tugas.
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - b. Pengoordinasian di bidang penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - d. Pembinaan dan pengarahan di bidang penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - f. Pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi dirinci sebagai berikut :
 - a. Merumuskan program kerja bidang penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo yang telah ditetapkan;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan program kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna

- pencapaian misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo yang telah ditetapkan kepada Sekretariat Daerah dan kepala unit kerja sebagaimana mestinya;
- c. Membina bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna pencapaian misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo yang telah ditetapkan;
 - d. Mengarahkan pelaksanaan program kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna pencapaian misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo yang telah ditetapkan Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan akuntabilitas kinerja;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.1.2. Sekertaris

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok yaitu Memimpin dan melaksanakan pelayanan administratif yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan kepegawaian kepada semua unsur berdasarkan pedoman yang berlaku sehingga tercipta kelancaran tugas .
- (2) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional program kerja lingkup kesekretariatan; Pendistribusian tugas dan petunjuk lingkup kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan program kerja lingkup kesekretariatan;
- c. Pengawasan pelaksanaan program kerja dan kegiatan lingkup kesekretariatan;
- d. Evaluasi pelaksanaan program kerja lingkup kesekretariatan;
- e. Pelaporan perencanaan program kerja lingkup kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain.

(3) Tugas Pokok dan Fungsi dirinci sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional pelaksanaan urusan kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengotimalkan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- c. Melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan sekretariat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Menyelia pelaksanaan urusan kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan kepegawaian sesuai dengan

- peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.

2.2.1.2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok yaitu Memimpin dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan pemeliharaan barang, rumah tangga serta penataan barang milik daerah.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pembagian tugas lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Pembimbingan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan kegiatan lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - e. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi dirinci sebagai berikut :
 - a. Merencanakan dan menyusun kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Membagi tugas dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
 - c. Melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, kehumasan, keprotokoleran, perjalanan dinas, kebersihan kantor, ketatalaksanaan, organisasi, perlengkapan dan pemeliharaan serta urusan umum lainnya;

- d. Mengevaluasi dan menilai hasil/prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- f. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.

2.2.1.2.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok yaitu Memimpin dan melaksanakan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan capaian kinerja dan anggaran berdasarkan pedoman yang berlaku sehingga tercipta kelancaran tugas.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan subbagian perencanaan;
 - b. Pembagian tugas lingkup subbagian perencanaan;
 - c. Pembimbingan pelaksanaan tugas subbagian perencanaan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan;

- e. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi dirinci sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan menyusun kegiatan Subbagian Perencanaan;
 - b. Membagi tugas dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan dan pengendalian rencana kinerja tahunan;
 - d. Melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - f. Melaksanakan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas meliputi bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun, laporan realisasi fisik kegiatan setiap bulan, dan laporan insidental lainnya berkaitan dengan kegiatan Dinas ;
 - h. Mengevaluasi dan menilai hasil/prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbagian Perencanaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- j. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan di bidang perencanaan dan pelaporan;
- k. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.

2.2.1.2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok yaitu Memimpin dan Melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan lingkup Subbagian Keuangan;
 - b. Pembagian tugas lingkup Subbagian Keuangan;
 - c. Pembimbingan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan lingkup Subbagian Keuangan;
 - e. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi dirinci sebagai berikut :
 - a. Merencanakan dan menyusun kegiatan Subbagian Keuangan;

- b. Membagi tugas dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- c. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Menyusun laporan keuangan dan aset akhir tahun;
- e. Melaksanakan perbendaharaan keuangan di lingkup Dinas;
- f. Mengevaluasi dan menilai hasil/prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbagian Keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.

2.2.1.2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- (1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok yaitu Memimpin dan melaksanakan urusan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi Identitas Penduduk, Pindah Datang Penduduk dan Pendataan Penduduk.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional program kerja lingkup Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - b. Pendistribusian tugas dan petunjuk lingkup Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - c. Pelaksanaan program kerja lingkup Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - d. Pengawasan pelaksanaan program kerja dan kegiatan lingkup Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - e. Evaluasi pelaksanaan program kerja lingkup Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - f. Pelaporan perencanaan program kerja lingkup Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - g. Pelaksanaan tugas lain.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi dirinci sebagai berikut :
- a. Merencanakan operasional pelayanan pendaftaran penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
 - b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
 - c. Melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - e. Menyelia dengan berbagai pihak dalam hal Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada

- pimpinan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.

2.2.1.4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

- (1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas pokok yaitu Memimpin dan melaksanakan urusan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang meliputi Pelayanan Kelahiran, Pelayanan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian serta Pelayanan Perkawinan dan Perceraian.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan operasional program kerja lingkup Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - b. Pendistribusian tugas dan petunjuk lingkup Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - c. Pelaksanaan program kerja lingkup Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - d. Pengawasan pelaksanaan program kerja dan kegiatan lingkup Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - e. Evaluasi pelaksanaan program kerja lingkup Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - f. Pelaporan perencanaan program kerja lingkup Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - g. Pelaksanaan tugas lain.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi dirinci sebagai berikut :
 - a. Merencanakan operasional Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan;

- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- c. Melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pelayanan Pencatatan Sipil dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Menyelia dengan berbagai pihak dalam hal Pelayanan Pencatatan Sipil;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.

2.2.1.5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas pokok Memimpin dan melaksanakan urusan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang meliputi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan operasional program kerja lingkup Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

- b. Pendistribusian tugas dan petunjuk lingkup Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. Pelaksanaan program kerja lingkup Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Pengawasan pelaksanaan program kerja dan kegiatan lingkup Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- e. Evaluasi pelaksanaan program kerja lingkup Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f. Pelaporan perencanaan program kerja lingkup Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- g. Pelaksanaan tugas lain.

(3) Tugas Pokok dan Fungsi dirinci sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- c. Melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Menyelia dengan berbagai pihak dalam hal Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas bawahan;

- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.

2.2.1.6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

- (1) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas pokok yaitu Memimpin dan melaksanakan urusan di bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- (2) Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai Fungsi :
 - a. Perencanaan operasional program kerja lingkup Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
 - b. Pendistribusian tugas dan petunjuk lingkup Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
 - c. Pelaksanaan program kerja lingkup Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
 - d. Pengawasan pelaksanaan program kerja dan kegiatan lingkup Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
 - e. Evaluasi pelaksanaan program kerja lingkup Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;

- f. Pelaporan perencanaan program kerja lingkup Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- g. Pelaksanaan tugas lain.

(3) Tugas Pokok dan Fungsi dirinci sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- c. Melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Menyelia dengan berbagai pihak dalam hal Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.

2.1.2. Kinerja Pelayanan OPD

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2		3	6	7	6	7	10	11	11		12
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk,			0,98	0,98	0,98	99,00	0,97	0,97	0,98	0,98	
2	Rasio bayi berakte kelahiran,			1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	1,00	1,00	
3	Rasio pasangan berakte nikah,			0,35	0,70	0,70	0,75	0,54	0,58	0,70	0,70	
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi,			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK,			Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP),			98,00	98,50	98,50	99,00	96,97	99,00	98,50	98,50	
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran.			100	100	100	100	99,84	99,88	100	100	

Rasio Penduduk berKTP per Satuan Penduduk

Untuk mendapatkan rasio penduduk berKTP persatuan penduduk adalah jumlah penduduk usia 17 (tujuh belas) tahun keatas yang BerKTP dibagi jumlah penduduk usia 17 (tujuh belas) tahun keatas atau yang sudah menikah.

No	Uraian	2023
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber-KTP	297.547
2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	308.155
3	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	0,97

Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Untuk mendapatkan rasio bayi berakte kelahiran adalah jumlah bayi berakte kelahiran dibagi jumlah bayi.

No	Uraian	2023
1	Jumlah bayi yang berakte kelahiran	31.239
2	Jumlah bayi	31.277
3	Rasio bayi berakte kelahiran	0,99

Rasio Pasangan Berakte Nikah

Untuk mendapatkan jumlah rasio pasangan berakte nikah adalah jumlah pasangan yang menikah dan memiliki akte nikah dibagi jumlah pasangan yang sudah menikah.

No	Uraian	2023
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	112.740
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	193.002
3	Rasio pasangan berakte nikah	0,58

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Penentuan indikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK adalah dalam suatu wilayah sudah menggunakan KTP EL.

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Menggunakan rumus Jumlah KTP-el Ber NIK yang diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk wajib KTP dikali seratus persen.

No	Uraian	2023
1	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan	297.547
2	Jumlah penduduk wajib KTP	308.155
3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97,31

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Menggunakan rumus jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dibagi Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan kemudian dikali seratus persen.

No	Uraian	2023
1	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	31.239
2	Jumlah kelahiran ditahun bersangkutan	31.277
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran	99,88

2.2.3 Pengolahan Data Informasi

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi OPD. Data

Informasi yang disajikan berdasarkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Tabel Data Informasi pada Tabel T-A.1 dan Tabel T-A.2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Data yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan PD dalam menyusun Renja Tahun 2026 kemudian data yang disajikan adalah data 5 tahun sebelum tahun perencanaan (Tahun 2019-2023)

N O	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satu an	Kondi si Awal RPJM D (Tahu n 0)	Capaian Kinerja Program															
				Tahun - 1 (2019)			Tahun - 2 (2020)			Tahun - 3 (2021)			Tahun - 4 (2022)			Tahun - 5 (2023)			
				Targ et	Realis asi	%	Targ et	Realis asi	%	Targ et	Realis asi	%	Targ et	Realis asi	%	Targ et	Realis asi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
2	Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi:																		
	f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,meliputi:																		
	f.1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk,	Rasio	1	0,90	0,99	110 %	0,90	0,99	110 %	0,95	0,99	104 %	0,96	0,97	101 %	0,98	0,97	99%	
	f.2. Rasio bayi berakte kelahiran,	Rasio	0,24	0,24	0,50	208 %	0,37	0,99	268 %	0,59	0,99	168 %	0,70	0,99	141 %	1,00	0,99	99%	
	f.3. Rasio pasangan berakie nikah,	Rasio	0,87	0,87	0,20	23%	0,20	0,41	205 %	0,25	0,49	196 %	0,30	0,54	180 %	0,35	0,58	166 %	
	f.4. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi,	Ada / tidak ada	Ada	Ada	Ada	100 %	Ada	Ada	100 %	Ada	Ada	100 %	Ada	Ada	100 %	Ada	Ada	100 %	
	f.5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK,	Sudah / Belum	Sudah	Suda h	Sudah	100 %	Suda h	Sudah	100 %	Suda h	Sudah	100 %	Suda h	Sudah	100 %	Suda h	Sudah	100 %	
	f.6. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan	%	99,11%	99,11	99,00	100 %	100,0 0	98,70	99%	100,0 0	99,64	100 %	100,0 0	96,97	97%	98,00	99,03	101 %	
	f.7. Cakupan penerbitan akta kelahiran.	%	75,98%	75,98	98,53	130 %	81,36	96,77	119 %	86,74	98,03	113 %	92,12	99,84	108 %	100	99,88	100 %	
	Rata- rata capaian kinerja per tahun(%)					110 %			143 %			126 %			118 %			109 %	
	Rata- rata capaian kinerja dalam 5 Tahun (%)																		

2.2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi OPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam prosedur memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan yang sesuai aturan.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya data kependudukan.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam prosedur memperoleh Akte Perkawinan yang sesuai aturan.
4. Masih kurangnya bimbingan teknis SDM bagi operator agar terwujud kualitas Pengetahuan Aparatur Pelayanan Administrasi Kependudukan.
5. Perlu dilaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan guna terciptanya data penduduk yang valid.

6. Masih tingginya jumlah Kartu Keluarga (KK) yang data perseorangnya yang kurang dinamis/ter *update*.
7. Kualitas data kependudukan yang dihasilkan Database SIAK masih kurang valid, masih tingginya data penduduk ganda/anomaly.

Tabel 2.3
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

ASPEK CAPAIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAH AN PELAYANAN OPD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
1	2	3	4	5	6
Indeks kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat diatas rata-rata	Survey kepuasan masyarakat	Rendahnya kualitas SDM	Rendahnya sarana dan prasarana yang dimiliki	Indeks kepuasan masyarakat masih dianggap rendah

Tabel 2.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran

TUJUAN : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Terintegrasi Berbasis Sistem Informasi				
NO	SASARAN	PERMASALAHAN PELAYANAN PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rendahnya akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.	Dukungan anggaran yang terbatas	Adanya sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang terintegrasi yang erat hubungannya dengan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja

2.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi	Rendahnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan	Adanya target nasional kepemilikan dokumen administrasi kependudukan
----	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat tiga hal yaitu :

- 1.Rancangan kerangka ekonomi daerah
- 2.Program prioritas pembangunan daerah dan
- 3.Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,

Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Wajo berdasarkan RKPD Kabupaten Wajo yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Wajo yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di Kabupaten Wajo.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Wajo

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.224.401.026,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.224.401.026,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.224.401.026,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.224.401.026,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.224.401.026,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.224.401.026,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DUKCAPIL)</i>	100 %	3.850.001.026,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DUKCAPIL)</i>	100 %	3.850.001.026,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan tepat waktu</i>	100 %	45.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan tepat waktu</i>	100 %	45.000.000,00	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	7.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	7.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	7.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	7.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	7.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	7.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	7.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	7.000.000,00

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	5.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	5.000.000,00
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Berita Acara	5.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Berita Acara	5.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD					Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun</i>	1 Dokumen	7.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun</i>	1 Dokumen	7.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselesaikan tepat waktu</i>	100 %	2.667.601.026,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselesaikan tepat waktu</i>	100 %	2.667.601.026,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	35 Orang/bulan	2.662.601.026,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	35 Orang/bulan	2.662.601.026,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	5.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	5.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terselesaikan tepat waktu</i>	100 %	30.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terselesaikan tepat waktu</i>	100 %	30.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	76 Paket	5.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	76 Paket	5.000.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	120 Orang	25.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	120 Orang	25.000.000,00

Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselesaikan tepat waktu</i>	100 %	224.400.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselesaikan tepat waktu</i>	100 %	224.400.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	900.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	900.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	15.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	15.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	5.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	5.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	15 Dokumen	2.500.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	15 Dokumen	2.500.000,00
Penyediaan Bahan/Material					Penyediaan Bahan/Material				

	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan tepat waktu	100 %	80.000.000,00			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan tepat waktu	100 %	80.000.000,00
Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	35.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	35.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	35.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	35.000.000,00
Pengadaan Aset Tak Berwujud					Pengadaan Aset Tak Berwujud				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terselesaikan tepat waktu</i>	100 %	628.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terselesaikan tepat waktu</i>	100 %	628.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	35.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	35.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	150.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	150.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	15.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	15.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	428.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	428.000.000,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terselesaikan tepat waktu</i>	100 %	175.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terselesaikan tepat waktu</i>	100 %	175.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	25.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	25.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	1 Unit	25.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	1 Unit	25.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	12 Unit	25.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	12 Unit	25.000.000,00

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>	1 Unit	25.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>	1 Unit	25.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	25.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	25.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	25.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	25.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	25.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	25.000.000,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		-	-	199.400.000,00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		-	-	199.400.000,00

Pelayanan Pendaftaran Penduduk		-	-	10.000.000,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		-	-	10.000.000,00
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan</i>	1 Dokumen	5.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan</i>	1 Dokumen	5.000.000,00
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	1 Laporan	5.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	1 Laporan	5.000.000,00
Penataan Pendaftaran Penduduk		-	-	174.400.000,00	Penataan Pendaftaran Penduduk		-	-	174.400.000,00
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan					Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia</i>	1 Dokumen	174.400.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia</i>	1 Dokumen	174.400.000,00
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		-	-	15.000.000,00	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		-	-	15.000.000,00

Sosialisasi Pendaftaran Penduduk					Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk</i>	1 Laporan	15.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk</i>	1 Laporan	15.000.000,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		-	-	65.000.000,00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		-	-	65.000.000,00
Pelayanan Pencatatan Sipil		-	-	15.000.000,00	Pelayanan Pencatatan Sipil		-	-	15.000.000,00
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil					Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun</i>	1 Dokumen	15.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun</i>	1 Dokumen	15.000.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		-	-	50.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		-	-	50.000.000,00
Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil					Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				

	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil</i>	1 Laporan	50.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil</i>	1 Laporan	50.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		-	-	110.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		-	-	110.000.000,00
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		-	-	65.000.000,00	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		-	-	65.000.000,00
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun</i>	1 Dokumen	65.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun</i>	1 Dokumen	65.000.000,00
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi		-	-	45.000.000,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi		-	-	45.000.000,00

Kependudukan					Kependudukan				
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan					Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan</i>	1 Dokumen	45.000.000,00		Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan</i>	1 Dokumen	45.000.000,00
				4.224.401.026,00					4.224.401.026,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang Kecamatan Tahun 2019 untuk membahas program dan kegiatan yang dibutuhkan di Tahun 2020. Dari hasil musrenbang yang dilaksanakan, tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Namun demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo telah mempunyai Program dan Kegiatan rutin yang salah satu sasaran kegiatannya adalah kecamatan se-Kabupaten Wajo, yaitu Program Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Wajo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Catatan: Tidak ada usulan dari pemangku kepentingan

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2026 Kabupaten Wajo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Catatan: Tidak ada usulan dari masyarakat

Tabel 2.8
Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat Dari
Hasil Musrenbang Kecamatan
Kabupaten Wajo

No	Kegiatan	Kriteria					Total skor	Urutan prioritas
		Kesesuaian dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Wajo	Mempercepat pencapaian SPM	Dukungan terhadap pemenuhan hak dasar rakyat lintas kecamatan	Dukungan nilai tambah lintas kecamatan	Lain-lain		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Kebijakan Nasional		
	Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri	
B	Kebijakan Provinsi		
	Meningkatkan Layanan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sul Sel	

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicator) yang terukur.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
1	2	3	4	5	6
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Terintegrasi Berbasis Sistem Informasi		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,50
		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B+
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi	Survei Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai	80,50

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencna Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap SPM

Tabel 4.1

Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap SPM Tahun 2024

No	Indikator SPM	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024	
				Target	Pagu Indikatif (Rp)

Untuk tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wajo tidak mempunyai rencana program kegiatan yang mendukung SPM Tahun 2024.

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap TPB/SDGS

Tabel 4.2

Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap TPB/SDGS 2024

No	Indikator TPB/SDGS	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
				Target	Pagu Indikatif (Rp)
	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pencapaian Target Nasional Bidang Pencatatan Sipil	100%	43.500.000

Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan Buku Pokok Pemakaman	60%	43.500.000
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	43.500.000

Untuk tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wajo memiliki target terhadap pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melingkupi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang dengan **indikator *Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)***.
2. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. Dengan Indikator sebagai berikut :
 1. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
 2. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.

4.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wajo mempunyai rumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab wajo. Adapun program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./ Kota
 - a) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pendaftaran Penduduk
 - a) Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - b) Penataan Pendaftaran Penduduk
 - c) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
 - a) Pelayanan Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a) Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - b) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.844.481.962,00							4.254.787.936,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.844.481.962,00							4.254.787.936,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.844.481.962,00							4.254.787.936,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.697.481.962,00						-	3.862.787.936,00	
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Rata-rata Realisasi Output Kegiatan Perangkat Daerah	100	100	100	100	4.697.481.962,00	-	-	-	-	-	-	3.862.787.936,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANRENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANRENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan tepat waktu</i>	-			100 %	3.505.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD	-	45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAPTA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	3.505.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital dan 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		7.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENYTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab, Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PE ND AP AT AN AS LI DA ER AH (PA D)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		7.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRASRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANRENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANRENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	OPD		5.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAL OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 B e r i t a A c a r a	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencengahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	OPD		5.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRALTA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	OPD		7.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENS TRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARG ET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.967.585.862,00			-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	-	-	2.668.287.936,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	3.964.585.862,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	-		2.663.287.936,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab, Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	-		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENYAKHTRA OPD	REALISASICAPAIANRENJATAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJATAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terselesaikan tepat waktu</i>	-			100 %	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAPTA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANRENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANRENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				76 Paket	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencerdasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN, KEMAJUAN DAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRANSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANRENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANRENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselesaikan tepat waktu	-			100 %	153.189.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD	-	234.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRANSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANRENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANRENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencerdasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	OPD		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	-	-	-	-	-	4.697.481.962,00	-	-	-	-	-	-	3.862.787.936,00	-
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ATAS NILAI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencerdasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah]	Rata-rata Realisasi Output Kegiatan Perangkat Daerah	100	100	100	100	4.697.481.962,00	-	-	-	-	-	-	3.862.787.936,00	-
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	3.740.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencerdasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRASTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANRENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANRENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				15 Dokumen	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ANASAL DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	OPD		2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	-	-	-	-	-	4.697.481.962,00	-	-	-	-	-	-	3.862.787.936,00	-
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN, PERDAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencerdasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah]	Rata-rata Realisasi Output Kegiatan Perangkat Daerah	100	100	100	100	4.697.481.962,00	-	-	-	-	-	-	3.862.787.936,00	-
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	149.449.100,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN, SEMUA ASAS DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencerdasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		210.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENY TRAOPTD	REALISASI CAPAIAN RENJANOPTD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANOPTD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan tepat waktu</i>	-			100 %	67.777.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD	-	82.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	3.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencerdasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		35.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	64.777.500,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencerdasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital. 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		35.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN, SUMBER DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencerdasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENY TRAO PD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terselesaikan tepat waktu</i>	-			100%	487.304.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD	-	628.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAL OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	17.304.500,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencerdasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANRENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANRENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	48.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	-	-	-	-	-	4.697.481.962,00	-	-	-	-	-	-	3.862.787.936,00	-
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencerdasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah]	Rata-rata Realisasi Output Kegiatan Perangkat Daerah	100	100	100	100	4.697.481.962,00	-	-	-	-	-	-	3.862.787.936,00	-
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	422.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		428.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRASOPD	REALISASICAPAIANRENJANTAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANTAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terselesaikan tepat waktu</i>	-			100%	18.120.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	OPD	-	175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENS TRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 U n it	7.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PE ND AP AT AN AS LI DA ER AH (PA D)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	-	OPD		25.000.000,00	DINAS KEPEND UDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIIL
	2.12.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENYAKONTRAOPD	REALISASICAPAIANNRENJATAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIANN TARGET RENJATAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	3.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencerdasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAPTAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJANRENJAOPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANRENJAOPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	8.120.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencerdasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	-	-	-	-	-	4.697.481.962,00	-	-	-	-	-	-	3.862.787.936,00	-
	2.12.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				10	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN APANAS LI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencerdasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah]	Rata-rata Realisasi Output Kegiatan Perangkat Daerah	100	100	100	100	4.697.481.962,00	-	-	-	-	-	-	3.862.787.936,00	-
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGE AKHIR PERIODENSTRAPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	-	-	-	-	-	4.697.481.962,00	-	-	-	-	-	-	3.862.787.936,00	-
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencerdasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANRENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANRENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				00	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN APAT AN AS LI DA ER AH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencerdasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-			-	123.100.000,00						-	212.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk]	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	10 70.80	67.56 7.97	00	70 8	123.100.000,00	-	-	-	-	-	-	212.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRASRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pelayanan pendaftaran penduduk	-			2 Dokumen	2.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	Masyarakat	-	14.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan</i>				1 Dokumen	1.400.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital dan 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	Masyarakat yang berprestasi		7.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANRENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANRENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			0				00	1.300.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PE ND AP AT AN AS LI DA ER AH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengukuhkan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital dan 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	M			7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jumlah laporan hasil penataan pendaftaran penduduk Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	-			99,00 % 1 Laporan 80 %	120.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencengahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	Masyarakat	-	178.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				00	120.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencengahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital dan 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	Masyarakat yang berakhlak adaptif, dan melayani berbasis digital dan 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital		178.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.03	Penyenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk	-			1 Dokumen	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	Masyarakat	-	20.000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Masyarakat		20.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	6.400.000,00						-	65.000,00	
		-	-	-	-	-	-	6.400.000,00	-	-	-	-	-	-	65.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															0	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	<i>Cakupan penerbitan akta kelahiran Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Rasio Pasangan berakte nikah</i>	-			100 % 100 % 0,75 Rasio	6.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	Masyarakat	-	15.000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun				1 Dokumen	6.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Masyarakat yang berprestasi		15.000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENYATA	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil]	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	00	100	6.400.000,00	-	-	-	-	-	-	65.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENY TRAJA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	<i>Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan Buku Pokok Pemakaman</i>	-			80 %	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencengahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	-	-	50.000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENYAKONTRAOPD	REALISASICAPAIANNRENJANTAHUN 2024	PRAKIRAA NCAPAIANN TARGET RENJANTAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	-	-			-	10.000.000,00						-	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENS TRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARG ET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEPENDU DUKAN														
		[Meningkat nya Pemanfaat an Informasi Kependud ukan]	Persentas e Informasi Kependu dikan yang Dimanfaat kan	95	90	00	91	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	110.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRASTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANRENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANRENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan secara tepat waktu undefined</i>	-			100 % undef ined undef ined	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	Masyarakat	-	65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02.001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRASRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANRENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANRENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggara Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Sengkang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital dan Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital			65.000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRANSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANRENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANRENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Inovasi Pelayanan terintegrasi Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan secara tepat waktu	-			2 Inovasi 100 %	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	M	-	45.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penyelesaian Pemanfaatan Data Kependudukan</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	Masyarakat		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-			-	7.500.000,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Kualitas Profil Kependudukan]	Jumlah Dokumen Pemenuhan Profil Kependudukan Tepat Waktu	1	1	1	1	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	7.500.000,00			-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	-	-	5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRANSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan kehadiran pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	-		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
J U M L A H								4.844.481.962,00							4.254.787.936,00	

BAB V**KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH**

5.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja perangkat daerah merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program kegiatan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RENSTRA dapat dicapai.

5.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 5.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Kabupaten Wajo

Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Target Kinerja (tahun)		Kondisi Akhir Renstra
			2025	2026	
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Terintegrasi Berbasis Sistem Informasi	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,00	3,05	3,15
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,00	78,10	79,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi	Survei Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai	81,50	82	83,50

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Terintegrasi Berbasis Sistem Informasi:

Indeks Pelayanan Publik:

Indikator kinerja untuk tujuan ini diukur melalui Indeks Pelayanan Publik. Target indeks untuk tahun 2025 dan 2026 adalah sebesar 3,00, dengan kondisi akhir Renstra ditetapkan pada nilai 3,15. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik yang tinggi.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah:

Nilai SAKIP Perangkat Daerah:

Indikator kinerja untuk sasaran ini adalah nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah. Target nilai SAKIP untuk tahun 2025 dan 2026 adalah predikat B+, dengan kondisi akhir Renstra tetap berada pada predikat B+. Ini menunjukkan upaya untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi:

Survei Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan:

Kualitas pelayanan administrasi kependudukan diukur melalui survei kepuasan layanan administrasi kependudukan. Target nilai survei untuk tahun 2025 dan 2026 adalah 82 , dengan kondisi akhir Renstra ditetapkan pada nilai 83,50. Ini mencerminkan upaya peningkatan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan menetapkan indikator kinerja ini, Perangkat Daerah Kabupaten Wajo berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Target yang ditetapkan diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.

Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 terus bertransformasi guna menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan perkembangan teknologi. Kebijakan terkait PEKPPP terkini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kebijakan ini merupakan hasil penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya, dimana pada instrumen yang baru telah memuat ukuran kualitas pelayanan publik yang dapat memotret layanan pemerintah sesuai dengan perkembangan terkini. Secara umum aspek yang digunakan masih sama seperti sebelumnya yang terdiri dari 6 (enam aspek), tetapi dengan penyempurnaan berbagai indikator pertanyaan. aspek dimaksud adalah: 1) Kebijakan Pelayanan; 2) Profesionalisme SDM; 3) Sarana dan Prasarana; 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); 5) Konsultasi dan Pengaduan; dan 6) Inovasi.

Di lingkup Disdukcapil kabupaten/kota, dua aspek yang menjadi kelebihan adalah aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Pada aspek konsultasi dan pengaduan, ketiga unit telah terhubung dengan SP4N LAPOR! sebagai sarana pengelola pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Tindak lanjut penyelesaian pengaduan juga telah sesuai dengan mekanisme, tata cara, dan pedoman pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2018. Pengaduan secara langsung pada ketiga unit tersebut juga telah terpisah dari front office dan memiliki ruang khusus konsultasi dan pengaduan untuk menjaga kerahasiaan untuk pihak yang berkonsultasi dan/atau menyampaikan aduan.

Dalam penerapan aspek inovasi, ketiga unit tersebut telah memiliki inovasi-inovasi pelayanan publik mumpuni yang telah melewati seluruh tahapan proses penciptaan inovasi, mulai dari pembelajaran inovasi, terciptanya

inovasi, inovasi yang memiliki umur lebih dari satu tahun sebagai indikasi inovasi yang berkelanjutan, mengikutsertakan inovasi dalam kompetisi, hingga mendapatkan prestasi atas inovasi tersebut. Keberlanjutan inovasi pelayanan publik juga didukung oleh sumber daya yang memadai melalui dukungan kebijakan (payung hukum), ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia untuk mengelola inovasi dan juga mendorong lahirnya inovasi-inovasi lainnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 telah menetapkan bahwa **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo memiliki skor indeks sebesar 2,90 atau dengan kategor B-**.

5.1.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 5.2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Asumsi Capaian 2025	Target 2026
1	2	3	4
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk,	0,98	0,98
2	Rasio bayi berakte kelahiran,	1,00	1,00
3	Rasio pasangan berakte nikah,	0,60	0,70
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi,	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK,	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan	98,50	98,50
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran.	100	100

- **Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk:** Pada tahun 2025, rasio penduduk yang memiliki KTP di Kabupaten Wajo ditargetkan mencapai 0,98. Target ini tetap dipertahankan pada tahun 2026 dengan rasio yang sama, yaitu 0,98.
- **Rasio Bayi Berakte Kelahiran:** Kabupaten Wajo telah menetapkan rasio bayi yang memiliki akta kelahiran mencapai 1,00 pada tahun 2025. Target ini juga tetap dipertahankan pada tahun 2026 dengan rasio yang sama, yaitu 1,00.
- **Rasio Pasangan Berakte Nikah:** Pada tahun 2025, rasio pasangan yang memiliki akta nikah ditargetkan sebesar 0,60. Untuk tahun 2026, target ini ditingkatkan menjadi 0,70, menunjukkan upaya peningkatan dalam pencatatan pernikahan resmi.
- **Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi:** Ketersediaan database kependudukan pada skala provinsi diharapkan sudah ada pada tahun 2025 dan tetap tersedia pada tahun 2026.
- **Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK:** Penerapan KTP Nasional yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Wajo diharapkan sudah terlaksana pada tahun 2025 dan tetap diterapkan pada tahun 2026.
- **Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP):** Cakupan penerbitan KTP di Kabupaten Wajo ditargetkan mencapai 98,50% pada tahun 2025. Target ini juga tetap dipertahankan pada tahun 2026 dengan persentase yang sama.
- **Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran:** Kabupaten Wajo menargetkan cakupan penerbitan akta kelahiran mencapai 100% pada tahun 2025. Target ini juga dipertahankan pada tahun 2026, memastikan semua bayi yang lahir memiliki akta kelahiran.

5.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi pengampu SPM

Tabel 5.3
Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah Kabupaten
Wajo

No	Indikator SPM	Target Nasional	Asumsi Cpaian 2025	Target 2026

Untuk tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wajo tidak mempunyai rencana program kegiatan yang mendukung SPM Tahun 2026.

BAB VI

PENUTUP

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, olehkarenanya segala konsekwensi yang terjadi harus menjadi tanggungjawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan.

Demikianlah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tahun Anggaran 2026 ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Agar Rencana Kerja ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.

Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Sengkang, 2 September 2025


KABUPATEN WAJO
PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WAJO

ANDI MUSDALIFAH Z, M.Si
NIP: 19690421 199403 2 014